

## ANALISIS DETERMINASI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN LAKIP SKPD DI KOTA JAMBI

**Arisman**

Politeknik Jambi

e-mail: [arisjambi2016@gmail.com](mailto:arisjambi2016@gmail.com)

[arisman@politeknikjambi.ac.id](mailto:arisman@politeknikjambi.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan standar akuntansi pemerintah, sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi dan pengendalian intern akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah dan hubungannya dengan LAKIP pada SKPD di Kota Jambi.

Sampel penelitian adalah kepala bagian/sub bagian/seksi akuntansi di SKPD Kota Jambi. Data penelitian dikumpulkan dengan *purposive sampling*. Hasil penelitian dalam Kendall'W menunjukkan adanya hubungan positif signifikan antara standar akuntansi pemerintah, sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi dan pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan uji reank spearman menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah, sumber daya manusia, dan pengendalian intern akuntansi ada hubungan signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan penerapan pemanfaatan teknologi tidak berpengaruh atau tidak signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan dan tidak ada hubungan antara kualitas laporan keuangan dengan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD di Kota Jambi.

Kata kunci : Standar Akuntansi Pemerintah, Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi, Pengendalian Intern, Akuntansi, kualitas laporan keuangan, dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

### Abstract

*This study is to test correlation Government accounting standard, human resources, utilization of technology and accounting internal control to the quality of local government financial reports and the correlation to accountability government office performance report.(LAKIP) at local government activity unit (SKPD) in Jambi. The Research sample are head departments/ sub departments/accounting section f at local government activity unit (SKPD) in Jambi, The Research data are collected from with purposive sampling. The research Resultsf in Kendall'W showing that there's a significant positive correlation between the Government accounting standart, human resources, utilization of technology and accounting internal control to the quality of local government financial reports meanwhile the reank Spearman test showing that application Government accounting standard, human resources, and accounting internal control to the quality of local government financial reports partly when the utilization of technology has no correlation to quality local government financial reports and there is no correlation between quality local government financial reports with accountability government office performance report.(LAKIP) at local government activity unit (SKPD) in Jambi*

*Keywords : Government accounting standart Human Resources, Information Tecnology Utilization, Accounting Internal Control, And the quality of local government financial reports, accountability government office performance report.*

## 1. Pendahuluan

Sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik, telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2006).

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan penyelenggaraan pemerintah yang diatur dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah adalah laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance government*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai (Suwardjono, 2013). Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005) antara lain : relevan, andal, dapat dipahami dan dibandingkan. Penelitian yang dilakukan Nugraheni dan Subaweh (2013) menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional

Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila tidak sesuai dengan perundang undangan, maka akan menimbulkan permasalahan.

Demikian juga hal dengan Gubernur/Walikota/Bupati, menyampaikan rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir laporan

yang dimaksud adalah laporan keuangan pemerintah daerah setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan (CaLK) yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah (bpk.go.id)

Dari hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2014, dinyatakan bahwa terhadap 444 LKPD yang diperiksa, BPK hanya memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 153 entitas, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 264 entitas, opini Tidak Wajar (TW) atas 9 entitas, dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) sebanyak 18 entitas. Perkembangan opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari tahun 2009 sampai tahun 2013 menunjukkan peningkatan kualitas yang tidak terlalu tinggi. Pada tahun 2009, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian hanya sebanyak 15 LKPD, tahun 2010 sebanyak 34 LKPD, tahun 2011 sebanyak 67 LKPD, tahun 2012 sebanyak 120 LKPD, tahun 2013 153 LKPD. Meskipun terdapat kenaikan proporsi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diikuti penurunan proporsi opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP), pemerintah daerah masih perlu meningkatkan kualitas dalam menyajikan suatu laporan keuangan yang wajar.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengumumkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2013 di Provinsi Jambi. Hasilnya, delapan dari sebelas pemerintah daerah di Jambi mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hanya tiga pemerintah daerah yang mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yaitu Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Batanghari.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) atas laporan keuangan semester I tahun 2014 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) LKPD Kota Jambi mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan belum ada perubahan dari tahun 2009 sampai s/d 2013 yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian

Laporan hasil pemeriksaan BPK tersebut Kota Jambi pada tahun 2013 belum bisa mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian disebabkan karena pengelolaan asset yang belum terpenuhi. Selain itu juga implikasi sistim pengendalian intern pengelolaan dan pertanggungjawaban dana penyelenggaraan PILKADA Kota Jambi belum memadai (bpk.go.id)

Selain itu untuk dapat menghasilkan laporan yang mempunyai nilai maka diperlukan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana Penelitian yang dilakukan Winidyaningrum (2009) bahwa sumber daya manusia berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pada PEMDA SUBOSUKAWONOSRATEN. Daniel dan Yohanes (2013), juga menyatakan bahwa Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah Pemerintah Tual.

Hal lain yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah (IKD) kepada pelayanan publik. Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Penelitian yang dilakukan Winidyaningrum (2009) bahwa pemanfaatan teknologi memiliki pengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan.

Manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, biaya pemrosesan yang lebih rendah, dan kemampuan *multiprocessing*.

Namun, pengimplementasian teknologi informasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, apabila teknologi informasi tidak atau belum mampu dimanfaatkan secara optimal, maka implementasi teknologi menjadi sia-sia dan semakin mahal. Selain itu, terdapat kendala yang ditemui dalam penerapan teknologi informasi, yaitu yang berkaitan dengan kondisi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data, kondisi sumber daya manusia yang ada, dan keterbatasan dana.

Selain itu yang mungkin mempengaruhi Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah pengendalian intern akuntansi. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa pengendalian intern merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta dipenuhinya peraturan perundang-undangan.

Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, dan juga memiliki peran penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*) dan melindungi sumber daya organisasi. Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang diterapkan untuk mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan laporan keuangan yang handal serta menjamin dipatuhinya peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini replikasi dari penelitian Winidyaningrum (2009) tentang pengaruh sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening pengendalian intern akuntansi, perbedaannya adalah peneliti mengambil populasi pada satuan kerja perangkat daerah yang ada di Kota Jambi, selain itu peneliti menggunakan 4 variabel idependen yaitu standar akuntansi pemerintah, sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, pengendalian intern akuntansi untuk menganalisis kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan hubungannya dengan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada satuan perangkat kerja daerah di Kota Jambi. Dari uraian yang dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti analisis determinasi kualitas laporan keuangan dan hubungannya dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penelitian ini akan dilakukan pada SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Jambi. Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Penerapan standar akuntansi pemerintah, kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, pengendalian intern akuntansi berhubungan dengan kulaitas laporan keuangan SKPD secara simultan.
2. Apakah Penerapan standar akuntansi pemerintah, kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, pengendalian intern akuntansi berhubungan dengan kulaitas laporan keuangan SKPD secara parsial
3. Faktor manakah yang paling berhubungan dengan kualitas laporan keuangan.
4. Apakah hubungan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Memberikan tambahan wacana penelitian empiris bagi akademisi dan pertimbangan untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Memberikan masukan yang berguna agar dapat menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Kajian Teoritis Dan Pengembangan Hipotesis

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual pada tahun 2010 selesai disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. Implementasi dari peraturan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat maupun Daerah secara bertahap didorong untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual. Paling lambat tahun 2015, seluruh laporan keuangan daerah sudah menerapkan SAP berbasis akrual.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (2010 : 21) peranan laporan keuangan pemerintah daerah yaitu laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan

Pelaporan keuangan meliputi segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. Aspek-aspek tersebut antara lain lembaga yang terlibat (misalnya penyusunan standar, badan pengawas dari pemerintah atau pasar modal, organisasi profesi, dan entitas pelapor), peraturan yang berlaku termasuk PABU (Prinsip Akuntansi Berterima Umum). Laporan keuangan hanyalah salah satu medium dalam penyampaian informasi. Laporan keuangan pada dasarnya adalah asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

(a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

(b) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

(c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

(d) Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

(e) Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang di rencanakan.

Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Agar informasi tersebut dapat mendukung dalam pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai, maka informasi akuntansi harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah antara lain (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005) :

- 1) Relevan, yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut :
  - a) Manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
  - b) Manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
  - c) Tepat waktu (*timeliness*). Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
  - d) Lengkap, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.
- 2) Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut:
  - a) Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
  - b) Dapat diverifikasi (*verifiability*). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
  - c) Netralitas, yaitu informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
- 3) Dapat dibandingkan  
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
- 4) Dapat dipahami  
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) harus mengacu pada Peraturan Pemerintah yang berlaku, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sampai dengan tahun anggaran 2013, pemerintah daerah masih menerapkan SAP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Perbedaan fundamental Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 terletak pada basis pencatatan transaksi dan jenis laporan keuangan.

Adapun laporan keuangan pokok yang harus disusun oleh pemerintah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan meliputi : (1) Neraca, (2) Laporan Arus Kas, (3) laporan perubahan saldo anggaran lebih (4) Laporan perubahan ekuitas (5) Laporan Operasional (6) Laporan Realisasi Anggaran (7) catatan atas laporan keuangan.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan mewajibkan setiap entitas pelaporan, yang dalam hal ini termasuk pemerintah daerah untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antara generasi dan evaluasi kinerja. Melalui penerapan SAP akan dapat disusun laporan keuangan yang *useful*. Kegunaan laporan keuangan ditentukan oleh isi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut. Agar laporan keuangan berisi informasi yang bermakna maka laporan keuangan harus disusun berpedoman pada SAP.

Penyimpangan dan kebocoran yang masih ditemukan di dalam laporan keuangan menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yaitu keterandalan. Penyebab ketidakandalan laporan keuangan tersebut merupakan masalah yang berhubungan dengan pengendalian intern akuntansi (Hevesi, 2005 dalam Winidyaninrum (2009). Pengendalian akuntansi juga akan sangat membantu mempercepat penyajian laporan keuangan pemerintah sehingga laporan keuangan tersebut menjadi tepat waktu. Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki ketrampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan.

Sumber daya manusia yang berkualitas juga dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan, disebabkan karena sumber daya manusia tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik sehingga penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu, semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan maka semakin baik untuk pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2006)

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidak sesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah

Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya. Pengolahan data menjadi suatu informasi dengan bantuan komputer jelas akan lebih meningkatkan nilai dari nilai informasi yang dihasilkan. Peningkatan nilai informasi tersebut seperti berikut: Informasi yang memiliki nilai tinggi adalah informasi yang disajikan dalam waktu yang cepat dan tepat. Untuk pemrosesan data manual biasanya berlaku bahwa semakin cepat waktu yang diinginkan untuk pemrosesan, maka biaya yang dibutuhkan akan semakin besar. Dengan bantuan komputer pengolahan data bisa diatur sedemikian rupa sehingga informasi dapat disajikan tepat waktu dan dengan biaya yang masih di bawah manfaat itu sendiri. Dengan kata lain, kita bisa mengatur pengolahan data sehingga manfaat ekonomis sebuah informasi dapat diperoleh secara maksimal (Wahana Komputer, 2003 dalam Winidyaningrum (2009).

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengolahan data diketahui memiliki keunggulan dari sisi kecepatan. Suatu entitas akuntansi dalam pemerintah daerah pasti akan memiliki

transaksi yang kompleks dan besar volumenya. Pemanfaatan teknologi informasi mesti akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi

PP Nomor 105 Tahun 2000 dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 telah membawa perubahan besar dan memberikan pendekatan baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Perubahan yang mendasar dalam PP Nomor 105 Tahun 2000 adalah terkait dengan perubahan dalam sistem penganggaran, baik proses penganggarannya maupun bentuk dan struktur APBD. Perubahan tersebut merupakan suatu perubahan yang bersifat paradigmatik, sementara perubahan yang lebih bersifat pragmatik dan teknis operasional diatur dalam Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, yaitu terkait dengan penatausahaan daerah. Perubahan itu sudah sampai pada teknik akuntansinya yang meliputi perubahan dalam pendekatan sistem akuntansi dan prosedur pencatatan, dokumen dan formulir yang digunakan, fungsi-fungsi otorisasi untuk tujuan sistem pengendalian intern, laporan serta pengawasan Unsur-unsur pokok yang diperlukan dalam menciptakan pengendalian akuntansi yang efektif antara lain: (a) adanya perlindungan fisik terhadap harta; (b) pemisahan fungsi organisasi yaitu pemisahan fungsi organisasi yang saling berkaitan; (c) adanya jejak audit yang baik; dan (d) sumber daya manusia yang optimal.

Prosedur pengendalian ditetapkan untuk menstandarisasi proses kerja, sehingga menjamin tercapainya tujuan organisasi dan mencegah atau mendeteksi terjadinya kesalahan. Adapun prosedur pengendalian tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut. (a). Personel yang kompeten (b). Pelimpahan tanggung jawab (c). Pemisahan tanggung jawab untuk kegiatan terkait (d). Pemisahan fungsi akuntansi, penyimpanan aset dan operasional

Menurut Wilkinson (2000) dalam Winidyaningrum (2009), sub komponen dari aktivitas pengendalian yang berhubungan dengan pelaporan keuangan adalah (a) perancangan yang memadai dan penggunaan dokumen-dokumen dan catatan-catatan bernomor, (b) pemisahan tugas, (c) otorisasi yang memadai atas transaksi-transaksi, (d) pemeriksaan independen atas kinerja, dan (e) penilaian yang tepat atas jumlah yang dicatat.

Pengendalian intern meliputi struktur organisasi, pembagian wewenang, pembebanan tanggung jawab, kebijakan praktik sumber daya manusia dan kesadaran pengendalian (Mulyadi, 2010). Dalam kerangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP ini juga berfungsi sebagai media. Pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran serta aktif seluruh lembaga pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi masyarakat. Dukungan tersebut merupakan pendorong utama dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan daerah, serta partisipasi masyarakat. Dukungan tersebut merupakan pendorong utama dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dan Sebagai perwujudan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana di maksud dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999.

Pelaporan kinerja dalam bentuk LAKIP diperkenalkan pada tahun 1999 (efektif berlaku mulai 2000/2001), mendahului pelaporan keuangan yang diundangkan tahun 2003 (efektif berlaku tahun 2006). Dalam perkembangannya, ternyata 'rezim' pelaporan keuangan lebih berkembang dibanding 'rezim' LAKIP. Oleh karena itu pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 (PP 8/2006) tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengharuskan pencantuman informasi tambahan tentang kinerja pengguna anggaran dalam laporan keuangannya. Pencantuman atau penambahan tersebut sejalan dengan paradigma penganggaran yang harus dapat mengidentifikasi keluaran (*output*) dari setiap kegiatan dan hasil (*outcome*) dari setiap program yang didanai dengan APBN/APBD.

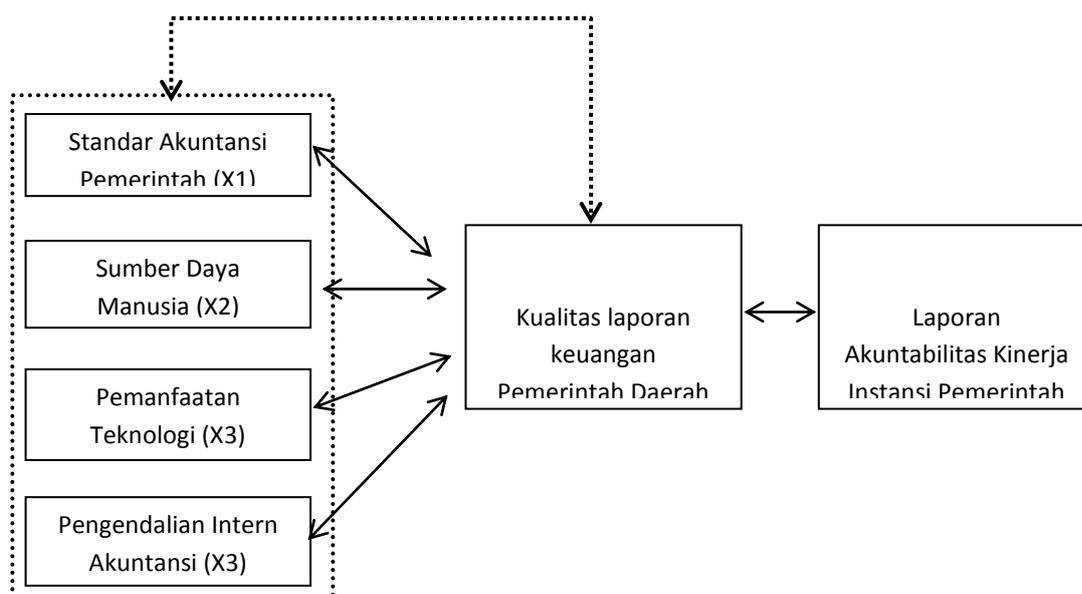
Dalam PP 8/2006 disebutkan bahwa laporan keuangan yang harus disusun dan disajikan oleh pemerintah pusat/daerah setidaknya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan Laporan Kinerja merupakan laporan tambahan yang terpisah dengan laporan keuangan tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan dan laporan kinerja merupakan jenis-jenis laporan yang terpisah, meskipun diharapkan penyusunannya dihasilkan dari sistem yang terintegrasi, penggabungan tersebut dilakukan sebagai berikut:

- a. Laporan Kinerja diharapkan didasarkan pada SAKIP yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran, dan sistem akuntansi pemerintahan (SAP), dan sistem perbendaharaan. Menurut Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003, SAKIP pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi.
- b. Pada Lampiran IV PP 8/2006 digambarkan tentang diagram hubungan antara Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan untuk pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Dalam PP 8 tahun 2006 dijelaskan bahwa Laporan Kinerja disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Jelaslah bahwa fungsi Laporan Kinerja adalah semacam laporan internal atau laporan manajemen, meskipun kemudian diintegrasikan dalam RUU APBN. Sedangkan Laporan Keuangan dikompilasi oleh Menteri Keuangan kemudian disampaikan kepada Presiden dalam bentuk Laporan Keuangan yang belum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Setelah dikoreksi dengan temuan BPK, Laporan Keuangan tersebut kemudian disampaikan bersama RUU P2 APBN kepada DPR. Dengan demikian, Laporan Keuangan merupakan laporan untuk tujuan umum.

Penggabungan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan tidak seharusnya terlalu menekankan pada hal-hal keuangan saja. Dengan demikian, pengukuran kinerja kuantitatif yang bersifat non keuangan menjadi sangat penting. Dalam kasus Indonesia, diharapkan penggabungan Laporan Kinerja sebagai hasil integrasi dengan sistem-sistem yang lain tidak hanya menonjolkan kinerja keuangan saja. Selanjutnya, dalam penggabungan tersebut dapat mengambil bentuk suatu laporan terpisah atau suatu laporan lengkap. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat dijelaskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

- H1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sumber Daya Manusia Pemanfaatan Teknologi dan Pengendalian Intern Akuntansi berhubungan dengan Kualitas Laporan Keuangan secara simultan.
- H2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sumber Daya Manusia Pemanfaatan Teknologi dan Pengendalian Intern Akuntansi berhubungan dengan Kualitas Laporan Keuangan secara parsial.
- H3. Faktor yang paling berhubungan dengan kualitas laporan keuangan
- H4. Kualitas Laporan Keuangan berhubungan positif terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



**Gambar 1**  
**Model Penelitian**

**3. Metoda Penelitian**

Dalam penelitian ini, semua populasi dijadikan sebagai sampel. Jumlah responden sebanyak 3 orang yang bekerja dibagian akuntansi di 27 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kota Jambi yaitu kepala Bagian atau Seksi akuntansi dan staf Bagian atau Seksi akuntansi. Jumlah responden semua adalah 81 orang.

Teknik statistik non parametrik yang digunakan adalah uji Konkordansi Kendall W. Koefisien Konkordansi Kendall W merupakan ukuran derajat keeratan atau keselarasan hubungan diantara k variabel yang diukur minimal dalam skala ordinal. Nilai pengamatan pada setiap baris diranking dan diurutkan rata-ratanya (*mean rank*), yang dapat dihitung dengan rumus (Suliyanto, 2014) :

$$Mean\ rank = \frac{Ri}{n}$$

Dengan :

$$Ri = \sum_{i=1}^n Xi$$

Dimana :

n = jumlah responden

Ri = jumlah data penilaian responden

Xi = nilai pengamatan yang diperoleh dari responden

Setelah diperoleh nilai Mean Rank selanjutnya dilakukan perhitungan statistik Kendall W yang ditentukan dengan rumus :

$$w = \frac{12\sum Ri^2 - 3n^2k(k+1)^2}{n^2k(k^2 - 1)}$$

Di mana :

- Ri = jumlah data penilaian responden  
 k = jumlah variabel (Kualitas laporan Keuangan, SAP, SDM. PI, dan PIA)  
 n = jumlah responden (Jumlah SKPD di Kota Jambi)

Untuk dapat memberikan interpretasi terhadap kuatnya hubungan tersebut, maka dapat digunakan pedoman seperti yang tertera pada tabel di bawah :

**Tabel 4.1**  
**Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi**  
**Koefisien Korelasi**

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0.000 s/d 0.199	Sangat Rendah
0.200 s/d 0.399	Rendah
0.400 s/d 0.599	Sedang
0.600 s/d 0.799	Kuat
0.800 s/d 1.000	Sangat Kuat

Sumber : Suliyanto, 2014

Langkah selanjutnya adalah dilakukan uji hipotesis. Secara statistik hipotesis diartikan sebagai pernyataan mengenai keadaan populasi (parameter) yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian (statistik). Jadi maksudnya adalah taksiran keadaan populasi mengenai data sampel. Dalam statistic yang di uji adalah hipotesis nol. Hipotesis nol adalah pernyataan tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik (Suliyanto, 2014). Pengambilan keputusan/pengujian hipotesis:

1. Membandingkan statistik hitung dengan statistik tabel, dengan ketentuan :

- Jika statistik hitung < statistik tabel, maka Ho diterima
- Jika statistik hitung > statistik tabel, maka Ho ditolak

1) Statistik Hitung

Dipakai perhitungan *Chi-Square* dengan rumus :

$$X^2 = [ n (k-1) ] \times W$$

Dimana :

N = jumlah responden

k = jumlah variable

2) Statistik Tabel

Dengan melihat tabel *Chi-Square*, nilai df (derajat kebebasan) dan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 5%, maka akan diperoleh nilai statistik tabel

2. Berdasarkan Probabilitas (*AsymptoticSignificance*), dengan ketentuan :

- Jika probabilitas > 0.05, maka Ho diterima
- Jika probabilitas < 0.05, maka Ho ditolak

Korelasi Spearman Rank digunakan untuk mencari hubungan atau untuk menguji signifikansi hipotensi asosiatif bisa masing-masing variabel yang dihubungkan berbentuk ordinal, dan sumber data variabel tidak harus sama (Sugiono, 2013).

Rumus yang digunakan dalam analisis korelasi Korelasi Spearman Rank adalah :

$$\rho = 1 - \frac{6\sum b_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

Dimana :

$\rho$  = Koefisiensi Korelasi Spearman Rank

n = Jumlah Sampel

#### 4. Pembahasan

Pada bagian ini akan diuji hubungan penerapan akuntansi pemerintah, sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi dan pengendalian intern akuntansi dengan kualitas laporan keuangan. Pengujian dilakukan menggunakan statistik non parametrik dengan alat uji *Kendall's W*.

Dari hasil olah data dengan menggunakan *Software IBM SPSS 22* diperoleh hasil uji statistik sebagai berikut :

**Tabel 5.1**  
**Hasil Uji Statistik *Kendall's W***

#### Test Statistics

N	27
Kendall's W <sup>a</sup>	.683
Chi-Square	73.791
Df	4
Asymp. Sig.	.000

a. Kendall's Coefficient of Concordance

Sumber : data olahan 2015

Dari Tabel 5.1 diatas, dapat di jelaskan bahwa nilai N = 27 adalah banyaknya data pengamatan, yaitu 27 SKPD di Kota Jambi. Nilai *Chi Square* sebesar 73.791 lebih besar dari r table pada df 4 yaitu 9.488. Nilai *Asymptotic Significance (Probability)* sebesar 0.000 atau lebih kecil dari 0.05. Dari angka tersebut terlihat adanya hubungan yang signifikan positif antara penerapan akuntansi pemerintah, sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi dan pengendalian intern akuntansi secara bersama-sama dengan kualitas laporan keuangan Daerah dengan tingkat keyakinan 95%. Nilai uji *Kendall's W* sebesar 0.683. Angka ini berada antara 0,600 – 0.799, yang menunjukkan bahwa antara variabel penerapan akuntansi pemerintah, sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi dan pengendalian intern akuntansi secara bersama-sama memiliki hubungan yang kuat dengan kualitas laporan keuangan Daerah.

Untuk mengetahui hubungan penerapan standar akuntansi pemerintah dan kualitas laporan keuangan Daerah dilakukan Uji Korelasi *Rank Spearman*. Dari hasil olah data dengan menggunakan *Software IBM SPSS 22*, diperoleh data seperti pada Tabel 5.2 sebagai berikut:

**Tabel 5.2**  
**Hasil Uji Korelasi Rank Spearman**  
**Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah**  
**dan Kualitas Laporan Keuangan.**

**Correlations**

			SAP	KUALITAS LK
Spearman's rho	SAP	Correlation Coefficient	1.000	.348*
		Sig. (1-tailed)	.	.037
		N	27	27
	KUALITAS LK	Correlation Coefficient	.348*	1.000
		Sig. (1-tailed)	.037	.
		N	27	27

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).

Sumber : data olahan 2015

Dari Tabel 5.2 diatas, dapat diketahui bahwa besarnya korelasi antara penerapan standar akuntansi pemerintah dan kualitas laporan keuangan Daerah adalah sebesar 0.348. *signifikan (sig)* sebesar 0.037 atau kurang dari 0.05, yang berarti menunjukkan bahwa korelasi antara penerapan standar akuntansi pemerintah dengan kualitas laporan Keuangan Daerah signifikan dengan tingkat kepercayaan 95%.

Untuk mengetahui hubungan antara sumber daya manusia dan kualitas laporan keuangan Daerah dilakukan Uji Korelasi *Rank Spearman*. Dari hasil olah data dengan menggunakan *Software IBM SPSS 22*, diperoleh data seperti pada tabel 5.3 sebagai berikut :

**Tabel 5.3**  
**Hasil Uji Statistik Korelasi Rank Spearman**  
**Sumber Daya Manusia dan Kualitas Laporan Keuangan.**

**Correlations**

			SDM	KUALITAS LK
Spearman's rho	SDM	Correlation Coefficient	1.000	.479**
		Sig. (1-tailed)	.	.006
		N	27	27
	KUALITAS LK	Correlation Coefficient	.479**	1.000
		Sig. (1-tailed)	.006	.
		N	27	27

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

Sumber : data olahan 2015

Dari Tabel 5.3 diatas, dapat diketahui bahwa besarnya korelasi antara sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan Daerah adalah sebesar 0.479. Selain itu terlihat

juga dari angka *Significane (sig)* sebesar 0.006 atau kurang dari 0.05, menunjukkan bahwa korelasi antara sumber daya manusia dengan kualitas laporan Keuangan Daerah signifikan.

Untuk mengetahui hubungan pemanfaatan teknologi dengan kualitas laporan keuangan aksesibilitas laporan keuangan Daerah dilakukan Uji *Rank Spearman*. Dari hasil olah data dengan menggunakan *Software IBM SPSS 22*, diperoleh hasil tabel 5.4 sebagai berikut:

**Tabel 5.4**  
**Hasil Uji Statistik Korelasi Rank Spearman**  
**Pemanfaatan Teknologi dan Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

Correlations			PT	KUALITAS LK
Spearman's rho	PT	Correlation Coefficient	1.000	.271
		Sig. (1-tailed)	.	.086
		N	27	27
	KUALITAS LK	Correlation Coefficient	.271	1.000
		Sig. (1-tailed)	.086	.
		N	27	27

Sumber : data olahan 2015

Dari Tabel diatas 5.4 diatas, dapat diketahui bahwa besarnya korelasi antara Pemanfaatan Teknologi dengan Kualitas Laporan Keuangan Daerah adalah sebesar 0.271. *Significane (sig)* sebesar 0.086 atau lebih dari 0.05, yang berarti menunjukkan bahwa korelasi pemanfaatan teknologi dengan kualitas laporan keuangan Daerah tidak signifikan.

Untuk mengetahui hubungan pengendalian Intern akuntansi dengan kualitas laporan keuangan dilakukan Uji *Rank Spearman*. Dari hasil olah data dengan menggunakan *Software IBM SPSS 22*, diperoleh hasil tabel 5.5 sebagai berikut:

**Tabel 5.5**  
**Hasil Uji Statistik Korelasi Rank Spearman**  
**Pengendalian Intern Akuntansi dan Kualitas Laporan Keuangan**

Correlations			PIA	KUALITAS LK
Spearman's rho	PIA	Correlation Coefficient	1.000	.390*
		Sig. (1-tailed)	.	.022
		N	27	27
	KUALITAS LK	Correlation Coefficient	.390*	1.000
		Sig. (1-tailed)	.022	.
		N	27	27

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).

Sumber : data olahan 2015

Dari Tabel di atas 5.5 di atas, dapat diketahui bahwa besarnya korelasi antara pengendalian intern akuntansi dan kualitas Laporan Keuangan Daerah adalah sebesar 0,390. *Significane (sig)* sebesar 0.022 atau kurang dari 0.05, yang berarti menunjukkan bahwa korelasi pengendalian intern akuntansi dan kualitas Laporan Keuangan Daerah signifikan.

Untuk mengetahui hubungan antara kualitas laporan keuangan dengan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilakukan Uji Korelasi Rank Spearman. Dari hasil olah data dengan menggunakan Software IBM SPSS 22, diperoleh data seperti pada tabel 5.6 sebagai berikut :

**Tabel 5.6**  
**Hasil Uji Statistik Korelasi Rank Spearman**  
**Kualitas Laporan Keuangan dengan**  
**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

**Correlations**

			KUALITAS LK	LAKIP
Spearman's rho	KUALITAS LK	Correlation Coefficient	1.000	-.059
		Sig. (1-tailed)	.	.385
		N	27	27
	LAKIP	Correlation Coefficient	-.059	1.000
		Sig. (1-tailed)	.385	.
		N	27	27

Sumber : data olahan 2015

Dari Tabel 5.6 di atas, dapat diketahui bahwa besarnya korelasi antara kualitas laporan Keuangan Daerah dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebesar - 0.056. *significan (sig)* sebesar 0.385 atau lebih dari 0.05, yang berarti menunjukkan bahwa korelasi kualitas laporan Keuangan Daerah dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tidak signifikan

## 5. Kesimpulan, Keterbatasan Dan Implikasi

Kesimpulan dari hasil pengolahan dan pembahasan data adalah secara simultan standar akuntansi pemerintah, sumber daya manusia. Pemanfaatan teknologi, pengendalian intern akuntansi berhubungan positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penerapan standar akuntansi pemerintah, sumber daya manusia, dan pengendalian intern akuntansi berhubungan signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan pemanfaatan teknologi tidak berhubungan atau tidak signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Faktor yang paling berhubungan terhadap kualitas laporan keuangan adalah sumber daya manusia dengan besaran korelasi 0.479. Kualitas laporan keuangan tidak ada hubungan atau tidak signifikan dengan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang diberikan adalah instansi pemerintah, diharapkan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan keuangan daerah dengan memperhatikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki baik pada tingkatan sistem, kelembagaan, maupun individu, didukung dengan penerapan standar akuntansi pemerintah. Laporan keuangan yang berkualitas dimulai dari sumber daya manusia,

maka diharapkan bagi instansi pemerintah Kota Jambi untuk menempatkan tenaga bagian akuntansi sesuai dengan lulusan jurusan akuntansi minimal D3 akuntansi disetiap SKPD. Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan yang diharapkan dapat diatasi pada penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah Kurangnya pemahaman dari responden terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner serta sikap kepedulian dan keseriusan dalam menjawab semua pertanyaan.

### Daftar Pustaka

- Halim, A. (2007). *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta. Penerbit UPP STIM YKPN.
- Halim, A., dkk. (2010). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Penerbit UPP STIM YKPN.
- Arif, B., dkk. (2009). *akuntansi Pemerintahan*. Jakarta, Akademia.
- Pamungkas, B. (2012). *Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan dan implikasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah*. Jurnal Ilmiah Ranggagading Vol 12, No 2, Edisi Oktober 2012; 82-83.
- Adhi, D.K., dan Yohanes. (2013). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi kasus Pada Pemerintah Kota Tual)*. Jurnal STIE Semarang Vol 5, No 3, Edisi Oktober 2013 (ISSN : 2252 – 7826).
- Sari, D. (2011). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah, Penyelesaian Temuan Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah implikasinya terhadap penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik. (Penelitian pada pemerintah daerah di Propinsi Jawa Barat dan Banten)*. Jurnal IJEB.
- Fontanella, A. (2010). Analisis Pengaruh Latar Belakang Pendidikan dan Pengetahuan Akuntansi Pengguna Terhadap Pemanfaatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dalam *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, 5 (2): h: 22-30.
- Bandariy, H. (2011). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Studi Pada Kabupaten Eks Karesidenan Banyumas)*. Melalui: <http://eprints.undip.ac.id/30992/1/Jurnal.Pdf.10/26/2014>.
- <http://www.bpk.go.id>
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta. Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Muhammad Nur. (2012). *Integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Dan Sistem Pelaporan Keuangan Instansi Pemerintah (Studi kasus pada KPPN Malang)*, Malang.
- Mulyadi, (2010), *Auditing Edisi 6*, Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang *Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang *Sistem Informasi Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, tentang *Penatausahaan Daerah*.
- PP Nomor 105 Tahun 2000, tentang *Penganggaran dan Prosedur Penganggaran*.

- Purwaniati Nugraheni dan Imam Subaweh. (2008). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan* Jurnal Ekonomi Bisnis Vol 13, No 1, April 2008.
- Sugiyono. (2008). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.
- Suwardjono, (2013). *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan Edisi ketiga*, BPFUEGM, Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Wahyono, T. (2004). *Sistem Informasi Akuntansi: Analisa , Desain, dan Pemograman Komputer*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Winidyaningrum, (2009). *Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris Pemda Subosukawonosrten)*, Tesis, Surakarta.